



e-ISSN: 2654-8488

Jurnal Riset Akuntansi Aksioma

<https://aksioma.unram.ac.id>
Vol. 24 No. 1, Juni 2025



TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 2021-2023

**Fauziah Husain¹, Hisantiawati Guhung², Nurlian Jerita³, Nur Hikmah Dai⁴,
Ziamudin Gustia Rahim⁵**

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia,
fauziah@iaingorontalo.ac.id

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia,
sanguhung@gmail.com

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia,
nurlianjerita401@gmail.com

⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia,
nurhikmadai@gmail.com

⁵ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia,
ziamudingustiarahim@gmail.com

Riwayat Artikel:

Received: 01 Januari 2025

Revised: 18 Maret 2025

Accepted: 22 Maret 2025

Published: 10 April 2025

Corresponding Author:

Nama: Hisantiawati Guhung

Email: sanguhung@gmail.com

DOI: 10.29303/aksioma.v24i1.453

© 2024 The Authors. This open access article is distributed under a (CC-BY License)



Abstract. This study examines the implementation of transparency and accountability in the financial statements of the Gorontalo City Government during the 2021-2023 period. This study is important considering the strategic role of transparency and accountability in realizing good governance and increasing public trust in state financial management. This study uses a qualitative descriptive approach by conducting an exploratory study of literature and data collection techniques using literature studies. Secondary data was obtained from previous research journals through Google Scholar. The results of the analysis show that the Gorontalo City Government's financial statements show a positive trend in terms of transparency and accountability. Regional financial independence has increased, with the ratio of PAD to total revenue reaching 23.66% (2021), 27.58% (2022), and 26.87% (2023). There has been a shift in spending priorities from operating expenditure to capital expenditure, indicating a focus on infrastructure development and fixed assets. This research contributes by identifying limitations in local government financial reports in providing detailed information on revenue and expenditure items, hindering in-depth analysis and reducing transparency. Furthermore, this research reveals key factors influencing transparency and accountability, namely political involvement, legal and regulatory frameworks, and the quality of human resources. As a practical contribution, this research recommends comprehensive steps to improve transparency and

accountability, including increased public participation and strengthening legal and regulatory frameworks.

Keywords: *transparency, accountability, financial statements, Gorontalo city*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo selama periode 2021-2023. Kajian ini penting mengingat peran strategis transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian eksploratif terhadap literatur dan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Data sekunder diperoleh dari jurnal penelitian terdahulu melalui Google Scholar.

Hasil analisis menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menunjukkan tren positif dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan, dengan rasio PAD terhadap total pendapatan mencapai 23.66% (2021), 27.58% (2022), dan 26.87% (2023). Terdapat pergeseran prioritas belanja dari belanja operasi ke belanja modal, menunjukkan fokus pada pembangunan infrastruktur dan aset tetap.

Penelitian ini berkontribusi dengan mengidentifikasi keterbatasan laporan keuangan daerah dalam memberikan detail pos pendapatan dan belanja, sehingga menghambat analisis mendalam dan mengurangi transparansi. Lebih lanjut, penelitian ini mengungkap faktor-faktor kunci yang mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas, yaitu keterlibatan politik, kerangka hukum dan regulasi, serta kualitas sumber daya manusia. Sebagai kontribusi praktis, penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah komprehensif untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas, meliputi peningkatan partisipasi publik dan penguatan kerangka hukum dan regulasi.

Kata kunci: *transparansi, akuntabilitas, laporan keuangan, kota Gorontalo*

PENDAHULUAN

Dalam konteks Indonesia, perjalanan menuju tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel telah melewati berbagai fase penting, terutama sejak era reformasi. Momentum reformasi tahun 1998 telah membawa perubahan paradigma yang fundamental dalam pengelolaan keuangan negara, dari yang sebelumnya cenderung tertutup dan sentralistik, menuju sistem yang lebih terbuka dan partisipatif. Perubahan ini kemudian diperkuat dengan lahirnya berbagai regulasi yang menjadi landasan hukum bagi implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Pratiwi et al., 2022)

Transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah merujuk pada keterbukaan dalam menjalankan aktivitas keuangan. Dalam konteks keuangan negara, hal ini berarti

pemerintah terbuka dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan keuangan, sehingga dapat dipantau dan diawasi oleh DPR/DPRD serta masyarakat. Dengan transparansi ini, tercipta akuntabilitas horizontal antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, serta responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.(Judijanto et al., 2024a)

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atau menjelaskan kinerja dan tindakan yang dilakukan oleh individu, badan hukum, atau pimpinan organisasi kepada pihak yang berwenang atau memiliki hak untuk meminta penjelasan tersebut. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas publik berarti penyampaian informasi dan pengungkapan mengenai aktivitas serta kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut.(Judijanto et al., 2024)

Implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah memiliki signifikansi yang sangat besar dalam upaya pemberantasan korupsi dan perwujudan good governance. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat korupsi berbanding terbalik dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Semakin transparan dan akuntabel pengelolaan keuangan suatu negara, semakin rendah tingkat korupsinya.(Jalaludin et al., 2024)

Laporan keuangan pemerintah merupakan instrumen utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Melalui laporan keuangan, pemerintah memberikan informasi yang komprehensif mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan pemerintah kepada berbagai pemangku kepentingan. Namun, untuk dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi berbagai kriteria dan standar yang telah ditetapkan.(Juliyanti, 2023)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010, berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. SAP menetapkan prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Kepatuhan terhadap SAP akan menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi standar kualitas, ditandai oleh karakteristik informasi yang bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami.(Rakhmawati et al., 2021)

Kemajuan teknologi informasi turut memberikan dimensi baru dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, penyajian informasi keuangan dapat dilakukan secara real-time dan mudah diakses oleh masyarakat. Berbagai inovasi seperti e-government, open government, dan government 2.0 telah menciptakan peluang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.(Remilla Sitohang, 2023)

Namun demikian, implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Kompleksitas organisasi pemerintah, keterbatasan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, dan belum memadainya infrastruktur pendukung merupakan beberapa kendala yang sering dihadapi dalam upaya mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel.(Rosana & Bharata, 2023)

Studi ini akan mengkaji lebih dalam mengenai implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah, kota Gorontalo dengan fokus pada analisis terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kedua prinsip tersebut. Kajian ini menjadi penting mengingat peran strategis transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.(Nazaruddin et al., 2023)

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan eksplorasi terhadap literatur yang relevan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yakni dengan menghimpun informasi dari berbagai sumber atau literatur yang mendukung kebutuhan penelitian. Secara khusus, penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan atau *library research*, dengan data sekunder yang diperoleh dari jurnal penelitian sebelumnya melalui media Google Scholar. Metode kualitatif berfokus pada pemahaman dan penafsiran terhadap kejadian atau perilaku manusia dalam konteks tertentu berdasarkan sudut pandang peneliti.

Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan permasalahan yang dihadapi atau menjelaskan hal-hal yang terkait dengan penelusuran teori, dengan cara mengumpulkan data hingga sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode kualitatif, terutama dalam kajian pustaka, merupakan teknik penelitian ilmiah yang menghasilkan laporan penelitian dengan fokus pada studi dan topik tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel berikut ini menyajikan data laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo selama periode 2021-2023, yang meliputi total pendapatan daerah, pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, total belanja daerah, belanja operasi, belanja modal, dan lain sebagainya.

Tabel Laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo 2021-2023

Kategori	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Total pendapatan daerah	Rp 1.025.548.385.000	Rp 961.043.065.000	Rp 1.120.904.000.000
Pendapatan asli daerah (PAD)	Rp 242.587.905.000	Rp 265.041.853.000	Rp 301.339.000.000
Pendapatan transfer	Rp 653.727.190.000	Rp 691.001.212.000	Rp 740.588.000.000
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp 129.233.290.000	Rp 5.000.000.000	-
Total belanja daerah	Rp 1.336.726.307.000	Rp 1.222.306.159.000	Rp 1.068.590.000.000
Belanja operasi	Rp 468.557.483.000	Rp 912.481.519.000	Rp 909.815.000.000
Belanja modal	Rp 387.543.546.000	Rp 303.370.393.000	Rp 154.892.000.000
Belanja tidak terduga	Rp 3.487.000.000	Rp 6.454.247.000	Rp 3.883.000.000
Penerimaan pembiayaan	Rp 323.668.369.000	Rp 273.253.540.000	Rp 78.978.000.000
Pengeluaran pembiayaan	Rp 12.490.446.000	Rp 11.990.447.000	Rp 52.314.000.000
Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)	Rp 104.727.564.000	-	-

Sumber: Laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo 2021-2023

A. Transparansi

Laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2021, 2022, dan 2023 memberikan gambaran tentang kinerja keuangan daerah dan menunjukkan hubungannya dengan transparansi.

- Kemandirian Keuangan dan Peran Transfer

Laporan keuangan menunjukkan bahwa Kota Gorontalo memiliki kemandirian keuangan yang cukup baik, dengan rasio PAD terhadap total pendapatan mencapai 23.66% (2021), 27.58% (2022), dan 26.87% (2023). Meskipun demikian, transfer dari pemerintah pusat masih menjadi sumber pendapatan utama, dan proporsi transfer mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo perlu terus berupaya meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan pada transfer

- **Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan**
Transparansi dalam pengelolaan keuangan merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Laporan keuangan Kota Gorontalo yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo memberikan informasi yang cukup transparan tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Data ini memungkinkan publik untuk memantau penggunaan anggaran dan menilai kinerja keuangan daerah
- **Peningkatan Transparansi Melalui Rincian Data**
Namun, transparansi dapat ditingkatkan dengan menyediakan rincian data yang lebih lengkap. Laporan keuangan tahun 2023 tidak menyediakan rincian untuk beberapa pos pendapatan dan belanja, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja pegawai. Informasi yang lebih detail akan memungkinkan publik untuk memahami lebih baik bagaimana anggaran digunakan dan bagaimana kinerja daerah dalam mencapai tujuannya
- **Pentingnya Akuntabilitas dan Partisipasi Publik**
Selain transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik juga penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran dan pengawasan anggaran. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2021, 2022, dan 2023 memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan daerah dan menunjukkan bagaimana Kota Gorontalo mengelola sumber dayanya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Laporan ini juga mencerminkan tingkat akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat, yang merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Akuntabilitas

- **Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan**
Akuntabilitas dalam konteks laporan keuangan merujuk pada pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Laporan keuangan yang transparan dan akurat merupakan salah satu cara untuk menunjukkan akuntabilitas tersebut.
- **Analisis Laporan Keuangan dan Akuntabilitas**
Berdasarkan data yang tersedia, berikut adalah beberapa poin penting terkait akuntabilitas Kota Gorontalo dalam tiga tahun terakhir:
 - a) **Kemandirian Keuangan:** Kota Gorontalo menunjukkan kemandirian keuangan yang cukup baik dengan rasio PAD terhadap total pendapatan mencapai 23.66% (2021), 27.58% (2022), dan 26.87% (2023). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo mampu mengandalkan sumber pendapatan lokalnya.
 - b) **Peningkatan PAD:** PAD Kota Gorontalo mengalami peningkatan secara bertahap, menunjukkan bahwa Kota Gorontalo berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan lokalnya.
 - c) **Pergeseran Prioritas Belanja:** Terjadi pergeseran prioritas belanja dari belanja operasi ke belanja modal. Pada tahun 2021 dan 2022, proporsi

belanja modal meningkat signifikan, menunjukkan bahwa Kota Gorontalo memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan aset tetap. Namun, pada tahun 2023, proporsi belanja operasi meningkat kembali, menunjukkan pergeseran prioritas ke pengeluaran rutin dan operasional.

- d) **Transparansi Informasi:** Laporan keuangan yang disajikan tidak menyediakan rincian untuk beberapa pos pendapatan dan belanja. Hal ini menjadi kendala dalam melakukan analisis yang lebih spesifik dan dapat mengurangi tingkat transparansi informasi.

C. Faktor-faktor transparansi dan akuntabilitas

Laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo untuk tahun 2021, 2022, dan 2023 menunjukkan beberapa tren yang relevan dengan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun laporan tersebut tidak memberikan rincian lengkap untuk semua pos pendapatan dan belanja, analisis yang tersedia mengungkap beberapa faktor penting yang memengaruhi transparansi dan akuntabilitas keuangan.

1) Keterlibatan Politik

Laporan keuangan tidak secara eksplisit membahas keterlibatan politik dalam pengelolaan keuangan. Namun, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah terkait erat dengan keterlibatan politik dalam berbagai aspek.

- **Pengambilan Keputusan:** Keterlibatan politik dalam pengambilan keputusan terkait anggaran dan alokasi dana dapat memengaruhi transparansi dan akuntabilitas. Proses pengambilan keputusan yang terbuka dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- **Pengawasan:** Keterlibatan politik dalam pengawasan pelaksanaan anggaran dan kinerja pemerintah daerah juga penting. Lembaga legislatif, seperti DPRD, memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan akuntabilitas.
- **Partisipasi Publik:** Keterlibatan politik dapat mendorong partisipasi publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Partisipasi publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan mengawasi penggunaan dana publik

2) kerangka hukum dan regulasi

Berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2021, 2022, dan 2023, beberapa faktor yang dapat dikaitkan dengan transparansi dan akuntabilitas meliputi:

a) Kerangka Hukum dan Regulasi:

- ✓ **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP):** Penerapan SAP yang konsisten dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjadi dasar penting dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. SAP memberikan pedoman yang jelas mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian pos-pos laporan keuangan.
- ✓ **Peraturan Perundang-Undangan:** Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, seperti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjadi kerangka hukum yang mengatur tata kelola keuangan daerah, termasuk penyusunan laporan keuangan.

- ✓ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): SPIP yang kuat dan efektif menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan.
- 3) kualitas sumber daya
- Ketersediaan Sumber Daya: Faktor Penting dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pemerintahan. Dalam konteks ini, ketersediaan sumber daya merujuk pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien.
- Beberapa sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah meliputi:
- ✓ Sumber Daya Manusia: Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil menjadi kunci dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan pemerintahan. Hal ini meliputi tenaga ahli di bidang keuangan, administrasi, pembangunan, dan lain sebagainya.
 - ✓ Sumber Daya Keuangan: Ketersediaan dana yang cukup dan terarah menjadi faktor penting untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintahan.
 - ✓ Sumber Daya Teknologi: Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan data dan informasi.
 - ✓ Sumber Daya Alam: Ketersediaan sumber daya alam seperti tanah, air, dan mineral dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dan mendukung pembangunan daerah.

Ketersediaan sumber daya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang berkualitas menjadi cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2021-2023 menunjukkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, ditandai dengan peningkatan pendapatan Asli daerah (PAD) dan pergeseran prioritas belanja ke belanja modal. Keterbukaan informasi memungkinkan pemantauan publik, namun detail data pada beberapa pos pendapatan dan belanja masih kurang. Akuntabilitas tercermin dalam pertanggungjawaban penggunaan dana publik, meskipun keterlibatan politik dan kurangnya detail laporan keuangan dapat mengurangi efektivitasnya. Transparansi dan akuntabilitas dipengaruhi oleh keterlibatan politik, kerangka hukum, dan kualitas sumber daya.

Untuk optimalisasi tata kelola keuangan, pemerintah Kota Gorontalo perlu meningkatkan detail dan kedalaman informasi dalam laporan keuangan, merinci semua pos pendapatan dan belanja. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta menganalisis dampaknya terhadap kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga naskah ini dapat diselesaikan.

KONTRIBUSI AUTHOR

Seluruh author memiliki kontribusi masing-masing dalam proses penyusunan, pencarian data samapai tahap analisis dan publish.

PENDANAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal dari sumber manapun

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dengan pihak manapun mengenai informasi, temuan, atau penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arza, O., Yulia, S., & Nancy, D. M. (2021). The Effect Of Human Resources, Application Of Government Accounting Standards And Accounting Information Systems On The Quality Of Financial Reports In The Government Of The City Of Padang Panjang. *Pareso Jurnal*, 3(3), 519–542.
- Fitri, M., & Khotimah, H. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. *Keunis*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.32497/keunis.v10i1.3013>
- Jalaludin, I., Yuhandra, E., Fathurahman, F., Bragi, R., & Tri, N. (2024). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ) Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good governance) Optimizing the Supervisory Function of the Kuningan Regency DPRD in Realizing Good governance (Good governance) mampu memastikan kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan*. 10(2), 306–324.
- Judijanto, L., Sudarmanto, E., & Triyantoro, A. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 3(02), 223–233. <https://doi.org/10.58812/jbmws.v3i02.1160>
- Juliyanti, W. (2023). Akuntabilitas Publik dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia (Public Accountability and Disclosure of Local Government Financial Statements (LKPD) in Indonesia). *Reviu Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis (RAMBIS)*, 3(1), 1–17.
- Jurnal, J., Mea, I., Akuntabilitas, P., & Transparansi, D. A. N. (2023). *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. 978–988.
- Lestari, N. A. (2023). *TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM*. 2(1), 55–61. <https://doi.org/10.32897/jiim.2023.2.1>.
- Mustaqmah, S. A., & Putri, D. P. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 8(2), 181–197. <https://doi.org/10.31869/me.v8i2.3738>
- Nazaruddin, I., Rahmandani, Y. M., & Sibuea, S. P. A. (2023). Determinants of Financial Reporting Local Government Organization Transparency and Accountability as a Mediator. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 276. <https://doi.org/10.24843/jiab.2023.v18.i02.p06>
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Nilna Syifa Zahro, Yolanda Afri Liyani, & Herlina Manurung. (2023). Faktor-Faktor Pendukung Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 96–104. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1497>
- Pratiwi, M. A., Yuwono, T., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). Analisis Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Kabupaten Pematang.

Husain, Guhung, Jerita, Dai, & Rahim: *Transparansi dan Akuntabilitas...*

- Perspektif*, 11(3), 1033–1042. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6272>
- Rakhmawati, I., Raden Sapto Hendri, & Nungki Kartikasari. (2021). Kebijakan Transparansi Dan Akuntabilitas: Mampukah Mencegah Penyelewengan Dana Desa? *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 20(1), 1–12. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i1.119>
- Rambu Ana, A. T., & Ga, L. L. (2021). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Remilla Sitohang. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa). *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(4), 421–431. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v1i4.780>
- Restufiani, A. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa: Studi kasus pada pemerintah Desa Wonosari Kabupaten Malang. *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Rosana, L., & Bharata, R. W. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnalku*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i1.366>
- Ummah, M. S. (2019). No LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Widaningrum, V. D., & Fahriani, F. Z. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Responsivitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2425–2435. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5899>
- Wulandari, D., Purnomo, H., & Murniati, W. (2018). Jurnal Riset Akuntansi Jurnal Riset Akuntansi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(2), 44–53. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v23i2.419>